



Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Dalam Menghadapi Tantangan Di Era Globalisasi

Rosalin Cintya Dwi Aulia¹, Syifa Az. Zahra Meydi², Aldila Febria Damayanti³, Revania Ath Thariq⁴,
Adyatma Surya Syailendra⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 15, 2025
Revised Desember 20, 2025
Accepted Desember 25, 2025

Kata Kunci:

Pancasila,
Globalisasi,
Paradigma Kehidupan,
Identitas Nasional

Keywords:

Pancasila,
Globalization,
Life Paradigm,
National Identity

ABSTRAK

Kehidupan rakyat Indonesia dipengaruhi oleh globalisasi dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Pancasila memiliki peran penting sebagai paradigma kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah arus perubahan yang cepat dan seringkali berorientasi pada nilai-nilai liberal. Dalam makalah ini, Pancasila dibahas sebagai dasar untuk sikap dan kebijakan nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi. Kajian ini menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial dapat menjadi pedoman untuk membuat kebijakan yang tetap berpijak pada identitas nasional dan fleksibel terhadap perkembangan global. Ini ditunjukkan melalui pendekatan deskriptif analitis. Dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma, diharapkan Indonesia dapat mempertahankan nilai dan budayanya sendiri tanpa menutup diri dari kemajuan dan inovasi global.

ABSTRACT

The lives of the Indonesian people are influenced by globalization in various aspects, including economic, social, political, and cultural aspects. Pancasila plays a crucial role as a paradigm for national and state life amidst rapid changes often oriented toward liberal values. This paper examines Pancasila as the basis for national attitudes and policies in facing the challenges of globalization. This study emphasizes that Pancasila values, such as humanity, unity, and social justice, can serve as guidelines for policymaking that remains grounded in national identity and flexible to global developments. This is demonstrated through a descriptive-analytical approach. By using Pancasila as a paradigm, it is hoped that Indonesia can maintain its own values and culture without isolating itself from global progress and innovation.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Rosalin Cintya Dwi Aulia
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Slamet Riyadi,
Surakarta, Indonesia
Email: aldilafebriaa@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Batas-batas antara negara telah dihapus selama era globalisasi, yang ditunjukkan oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Menurut (Nurhaidah, 2015) globalisasi dapat diartikan sebagai proses masuknya keruang lingkup dunia. Globalisasi memberikan dampak baik itu positif maupun negatif. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Tidak hanya fenomena ini meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menimbulkan risiko "penyeragaman budaya", atau westernisasi, yang dapat mengancam nilai-nilai lokal. Sebagai mahasiswa, kita menyadari bahwa Pancasila adalah paradigma dan bukan hanya simbol negara. Paradigma berarti Pancasila menjadi kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah pembangunan bangsa. Masalah utama dalam artikel ini adalah bagaimana posisi Pancasila tetap relevan ketika nilai-nilai pragmatisme dan individualisme global mulai masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia.

Konstitusi Republik Indonesia berfungsi sebagai dasar filosofi negara Republik Indonesia. Sebelum proses dan setelah penerapan pancasila sebagai dasar negara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang masa lalu Indonesia. Hal ini terkait dengan upaya kerajaan untuk mempertahankan jati diri Indonesia. Pancasila telah berfungsi sebagai dasar negara bangsa Indonesia selama bertahun-tahun dan telah dipengaruhi oleh banyak hal dan peristiwa sehingga Pancasila sekarang berdiri di depan semua bangsa Indonesia. Banyak orang telah menganggap Pancasila sebagai paradigma hidup dalam masyarakat bernegara, meskipun ada konflik internal di antara penciptanya. Sampai saat ini, di era reformasi dan globalisasi, Pancasila masih diperdebatkan oleh banyak orang di bidang pendidikan, terutama di kalangan politisi dan mahasiswa. Sejarah Pancasila sebagai dasar Negara dan potensinya untuk berfungsi sebagai penengah bagi mereka yang berbeda pendapat tentang dasar negara untuk memastikan bahwa semboyan kita, "Bhinneka Tunggal Ika", tetap ada di masa depan.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat bagaimana Pancasila dapat digunakan sebagai paradigma di era globalisasi, dengan fokus pada aspek-aspek penting seperti identitas budaya, keseimbangan ekonomi, dan solidaritas sosial. Untuk mencapai tujuan ini, analisis literatur dan studi kasus digunakan, serta globalisasi data dari lembaga internasional seperti PBB dan IMF.

2. METODE

Metode penelitian ini adalah penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan studi literatur sebagai metode utamanya. Data diperoleh dengan menganalisis dokumen, buku, artikel ilmiah, dan sumber lain yang relevan dengan studi Pancasila sebagai paradigma kehidupan. Analisis dilakukan secara tematik dengan fokus pada lima sila Pancasila dan bagaimana sila-sila ini dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Metode ini memungkinkan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam Pancasila dan untuk menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk memastikan keakuratan dan relevansi data, triangulasi sumber digunakan untuk validasi data. Data diambil dari buku teks, jurnal ilmiah, dan dokumen kenegaraan yang relevan. Untuk menemukan solusi untuk masalah Pancasila di era modern, analisis data dilakukan dalam tiga tahap: data direduksi, disediakan (ditunjukkan), dan ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pancasila sebagai Landasan Pembangunan

Pancasila sebagai paradigma mengimplikasikan bahwa semua aspek pembangunan nasional harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

a. Sila I & II: Pembangunan Berbasis Moral dan Humanisme

- 1) Memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada materi (ekonomi), tetapi juga mengedepankan etika religius dan martabat manusia. Pembangunan tidak boleh melahirkan "dehumanisasi" demi kemajuan teknologi atau industri.

- 2) Penerapan: Kebijakan publik harus menghormati hak asasi manusia dan keberagaman agama. Misalnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh merampas hak hidup masyarakat adat atau merusak ekosistem yang menjadi sumber kehidupan (Etika Lingkungan).
 - 3) Tujuan: Menciptakan masyarakat yang maju secara materi namun tetap memiliki kedalaman spiritual dan integritas etis.
- b. Sila III: Integrasi Nasional dalam Kompetisi Global
- 1) Menegaskan bahwa dalam menghadapi persaingan global, kesatuan nasional menjadi hal terpenting. Dalam era globalisasi, ancaman disintegrasi sering muncul akibat ketimpangan antarwilayah.
 - 2) Penerapan: Pembangunan harus bersifat "Indonesiasentris", bukan sekadar "Jawasentris". Infrastruktur digital dan fisik di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) adalah perwujudan sila ketiga untuk memperkuat rasa kebangsaan.
 - 3) Tujuan: Menjaga kedaulatan bangsa agar tidak mudah terfragmentasi oleh kepentingan asing.
- c. Sila IV & V: Demokrasi Ekonomi dan Keadilan Sosial.
- 1) Mengarahkan kebijakan ekonomi untuk tidak terjebak dalam kapitalisme murni, melainkan fokus pada kesejahteraan sosial. Merupakan kritik terhadap sistem kapitalisme neoliberal yang sering kali hanya menguntungkan pemilik modal besar.
 - 2) Penerapan: Penguatan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, koperasi, dan jaminan sosial yang merata (BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan). Kebijakan ekonomi harus melibatkan partisipasi publik (musyawarah) dan berorientasi pada pemerataan hasil pembangunan.
 - 3) Tujuan: Mencegah terjadinya jurang pemisah (gap) yang lebar antara si kaya dan si miskin.

3.2 Pancasila sebagai Landasan Ideologis

Pancasila sebagai landasan ideologis dan paradigma kehidupan bangsa Indonesia dalam mempertimbangkan masalah globalisasi. Proses integrasi teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya yang dikenal sebagai globalisasi membawa manfaat dan ancaman, termasuk ketimpangan sosial, konflik budaya, dan kehancuran identitas nasional. Untuk menemukan relevansi Pancasila sebagai pedoman moral dan praktis di era globalisasi, tinjauan ini menggabungkan teori, penelitian empiris, dan analisis konsep dari sumber-sumber utama. Metode observasi mencakup pemeriksaan tematik dari jurnal, buku, dan laporan internasional dari tahun 2000-an hingga sekarang.

Dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan terdiri dari lima sila yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, dan Keadilan Sosial untuk menekankan Pancasila sebagai gabungan budaya Indonesia yang dapat mempertahankan keseimbangan di tengah pluralitas. Oleh Tim Penulis Universitas Indonesia (2020), menemukan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar moral untuk menghadapi globalisasi dan membantu menyeimbangkan nilai universal dan lokal.

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa Pancasila memiliki hubungan langsung dengan strategi menghadapi globalisasi. Contoh empiris: Kebijakan Nawacita pemerintah Jokowi, yang menekankan redistribusi sumber daya untuk mengurangi kesenjangan, menerapkan sila keadilan sosial [1]. Penelitian UNESCO tentang Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi 2018 menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan, dapat mendorong etika digital, melindungi data, dan mengurangi kesenjangan digital. Studi yang dilakukan selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa gotong royong Pancasila meningkatkan solidaritas nasional daripada individualisme global (Laporan WHO, 2021).

Contoh empiris: Kebijakan Nawacita pemerintah Jokowi menerapkan keadilan sosial dengan menekankan pembagian sumber daya untuk mengurangi kesenjangan [1]. Penelitian UNESCO tentang Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi 2018 menemukan bahwa prinsip-prinsip Pancasila, seperti

kemanusiaan, dapat mendorong etika digital, perlindungan data, dan pengurangan kesenjangan digital. Studi yang dilakukan selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa, daripada meningkatkan individualisme global, gotong royong Pancasila meningkatkan solidaritas nasional.

3.3 Rintangan Globalisasi dan Penapisan Pancasila

Globalisasi mengantarkan paham asing seperti konsumsi dan liberalisme. Di sinilah Pancasila berperan sebagai penyaring. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan mengajarkan cara berpikir dan bertindak sesuai dengan ideologi negara [6]. Pancasila tidak bersifat eksklusif (dogmatis), melainkan ideologi inklusif yang dapat mengadopsi nilai-nilai kemajuan (seperti disiplin dan etos kerja) tanpa kehilangan identitasnya [2].

a. Rintangan Globalisasi terhadap Pancasila

- 1) Individualisme & Materialisme: Arus global membawa paham yang lebih mementingkan diri sendiri dan pencapaian materi, yang dapat mengikis semangat Gotong Royong dan Keadilan Sosial.
- 2) Westernisasi & Konsumerisme: Gaya hidup kebarat-baratan yang diadopsi secara mentah-mentah dapat membuat masyarakat merasa asing dengan budaya sendiri (alienasi budaya).
- 3) Ideologi Transnasional: Masuknya paham ekstremisme, radikalisme, dan liberalisme ekstrem yang menantang kesepakatan nasional tentang bentuk negara dan keberagaman.
- 4) Disrupsi Digital: Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

b. Penapisan (Filterisasi) Berbasis Pancasila

Sebagai alat penapis, Pancasila bekerja dengan cara:

- 1) Filter Moral dan Etika: Menilai apakah budaya atau teknologi baru melanggar prinsip Ketuhanan dan Kemanusiaan. Jika suatu kemajuan justru merendahkan martabat manusia, maka hal tersebut harus ditolak.
- 2) Filter Nasionalisme: Menyeleksi kepentingan global agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan kedaulatan negara (Sila ke-3).
- 3) Adaptasi Kritis: Indonesia tidak menutup diri, melainkan menyerap unsur global yang positif (seperti etos kerja dan teknologi) namun tetap menyesuaikannya dengan norma lokal.

3.4 Penerapan di Kalangan Generasi Z

Pada saat ini dengan derasnya arus globalisasi memudahkan budaya luar masuk ke Indonesia. Hal ini mengkhawatirkan terhadap perkembangan generasi muda yaitu terutama generasi Z yang hidupnya sudah sangat dimanjakan teknologi. Menurut Nurhaidah 2015 globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cepat yang saling ketergantungan dan hubungan antara negara di dunia dalam hala perdagangan dan keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, globalisasi adalah fenomena dalam kehidupan manusia yang bergerak dan berkembang secara terus menerus tantangan terbesar bangsa terhadap dunia global ini adalah nilai-nilai kebangsaan mulai luntur [3]. hilangnya nilai kejujuran, perpecahan di mana-mana, kurang pedulinya terhadap orang lain dan lain lain [7]. Jika dibiarkan begitu saja bangsa Indonesia bisa kehilangan jati dirinya hal ini sejalan dengan yang dikatakan Thomas Lickona (1992) dalam (Eva Imania Eliasa, 2008) bahwa terdapat sepuluh tanda perilaku manusia yang menunjukkan arah kehancuran suatu bangsa yaitu: (1) Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) Ketidakjujuran yang membudaya, (3) Semakin tingginya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan figur pemimpin, (4) Pengaruh teman sebaya terhadap tindakan kekerasan, (5) Meningkatnya kecurigaan dan kebencian, (6) Penggunaan bahasa yang buruk, (7) Penurunan etos kerja, (8) Menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, (9) Meningkatnya perilaku merusak diri, (10) Semakin kaburnya pedoman

moral. Salah satu penyebab menurunnya karakter bangsa antara lain karena adanya pengaruh globalisasi [8]. Seiring berjalannya waktu hal ini tentu akan mempengaruhi karakter masyarakat yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia dan ini lah yang terjadi “Karakter mengacu kepada serangkaian sikap (attitude), perilaku (behavior), motivasi (motivation), dan keterampilan (skill)”(Gunawan, 2012). Hal ini disebabkan karena meningkatnya budaya asing yang masuk. Sementara itu dalam pelaksanaannya, tidak terdapat filtrasi yang bisa memisahkan antara budaya mana yang baik dan kurang baik yang diterapkan [4].

Kenichi Ohmae (1995) berpendapat bahwa punahnya suatu bangsa disebabkan oleh 4 “I” diantaranya industri, investasi, individu dan informasi. Untuk itu pentingnya pendidikan pancasila diselenggarakan di seluruh tingkatan pendidikan untuk menanamkan moral2 pancasila kepada generasi penerus cita-cita bangsa [5]. Pancasila menurut (Lasiyo et al., 2019) merupakan dasar negara yang sudah seharusnya dipelajari, didalami, dikembangkan serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam setiap aspek bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kemudian pendalaman dan penghayatan Pancasila itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu dengan memperhatikan potensi yang ada pada diri individu [9].

a. Reaktualisasi Pancasila pada zaman digital dapat dilaksanakan melalui:

- 1) Kewarganegaraan Digital: Memanfaatkan media sosial secara etis yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila (anti-hoax dan toleransi).
- 2) Ekonomi Kreatif: Memperluas bisnis yang berlandaskan kearifan lokal dengan mutu internasional.

3.5 Beberapa bentuk penerapan Pancasila oleh Gen Z :

a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Gen Z cenderung mempraktikkan toleransi beragama yang lebih moderat dan inklusif.

Penerapan: Menghormati perbedaan keyakinan di media sosial, mengikuti komunitas lintas agama, dan menolak konten yang memicu konflik SARA.

Aksi: Menggunakan fitur filter atau report untuk membendung ujaran kebencian berbasis agama.

b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Generasi ini sangat vokal terhadap isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial (social justice).

Penerapan: Melakukan penggalangan dana digital (seperti via Kitabisa.com), menyuarakan kampanye anti-perundungan (anti-bullying), serta mendukung gerakan kesetaraan gender dan hak asasi manusia.

Aksi: Gerakan "Digital Activism" untuk membantu korban kekerasan atau bencana alam.

c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Persatuan diwujudkan melalui kolaborasi kreatif yang melintasi batas geografis.

Penerapan: Bangga menggunakan produk lokal (gerakan Local Pride), mempromosikan budaya Indonesia melalui konten kreatif di TikTok atau Instagram, serta kolaborasi dalam komunitas hobi tanpa memandang suku.

Aksi: Menggunakan bahasa Indonesia yang baik namun tetap relevan di ruang digital.

d. Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Gen Z cenderung lebih kritis dan partisipatif dalam proses demokrasi.

Penerapan: Menggunakan hak suara dalam pemilu, berani berdiskusi secara terbuka mengenai kebijakan publik di ruang digital, dan mengedepankan musyawarah dalam organisasi kemahasiswaan.

Aksi: Berpartisipasi dalam petisi daring untuk kebijakan yang tidak pro-rakyat.

e. Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sering terlihat dalam kepedulian terhadap lingkungan dan ekonomi inklusif.

Penerapan: Mengadopsi gaya hidup berkelanjutan (eco-friendly), mendukung UMKM lokal, dan berupaya mengurangi kesenjangan akses informasi melalui edukasi gratis di internet.

Aksi: Gerakan memilah sampah atau kampanye zero waste sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan (keadilan bagi generasi mendatang).

3.6 Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Berbangsa Dan Bernegara

Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Berbangsa Dan Bernegara Saat Ini: Untuk melawan berbagai ancaman ekstremisme, pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai pancasila harus disegerakan “Sebagai suatu ideologi bangsa dan Negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia”(Asmaroini, 2016). dengan menanamkan nilai-nilai ketuhanan dalam kebudayaan dan kemanusiaan nasional serta praktik permusyawaratan yang berorientasi keadilan. Sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk memiliki pandangan hidup jika mereka ingin berdiri kokoh dan mengetahui ke mana tujuannya. Dengan memiliki perspektif hidup ini, negara dapat memecah masalah. Tanpa pandangan hidup ini, suatu negara akan merasa terombang-ambing saat menghadapi masalah masyarakatnya sendiri dan dunia. Selain berfungsi sebagai dasar negara, pancasila juga merupakan pandangan hidup, juga disebut sebagai "way of life", "pegangan hidup", "pedoman hidup", "pandangan dunia", atau "petunjuk bangsa indonesia", yang berarti dasar kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi tantangan dalam hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa juga merupakan representasi dari nilai budaya yang diyakini oleh bangsa indonesia sebagai kebaikan dan kebenaran.

Oleh karena itu, pancasila adalah ciri khas bangsa Indonesia sejak berdirinya sebagai bangsa bernegara. Kehidupan sehari-hari orang Indonesia dipandu oleh Pandangan Hidup Negeri Pancasila dalam sikap dan perilaku mereka, yang selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan mereka. Karena Indonesia dapat mencapai semua itu, masyarakat Indonesia tidak dapat hidup sendiri dan harus tetap memiliki hubungan dengan masyarakat lain. Dengan memiliki pandangan hidup yang jelas, suatu bangsa akan memiliki pedoman untuk memecahkan masalah, seperti masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang muncul dalam masyarakat yang semakin maju. Dengan menggunakan pandangan hidup sebagai ideologi, sebuah bangsa akan membangun dirinya sendiri dan negerinya.

4. KESIMPULAN

Karena nilai-nilainya yang universal dan adaptif, Pancasila tetap relevan dan efektif sebagai paradigma di era globalisasi dan mampu menavigasi konflik antara peluang kemajuan dan bahaya kehilangan identitas. Hardono Hadi dalam (Winarno, 2020) menyatakan Pancasila sebagai jati diri bangsa mencakup empat aspek, yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai keunikan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian ini lah yang perlu ditanamkan pada diri bangsa Indonesia [10]. Nilai-nilai Pancasila perlu dilibatkan dalam karakter setiap masyarakat Indonesia, sehingga eksistensi Pancasila sebagai identitas negara dapat tercerminkan. Prinsip-prinsip Pancasila memungkinkan globalisasi untuk memperkuat solidaritas nasional dan keharmonisan sosial, sehingga menganggapnya sebagai peluang, bukan ancaman. Hasil menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi numerik; itu adalah kerangka hidup yang bergerak yang mendukung kehidupan bermasyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah dan KPPU perlu memperkuat pengawasan terhadap dampak merger antara PT Indosat Tbk dan Tri Indonesia, baik sebelum maupun setelah pelaksanaannya, untuk memastikan tidak terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat di sektor telekomunikasi. Regulasi terkait pengembalian frekuensi harus diterapkan secara tegas untuk mencegah dominasi frekuensi oleh entitas tertentu yang berpotensi merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. Selain itu, Indosat Ooredoo Hutchinson diharapkan dapat menjaga transparansi dalam melaporkan setiap aktivitas usaha kepada

KPPU dan Kominfo, sekaligus memastikan pengelolaan kapasitas jaringan dilakukan secara optimal untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa mengurangi kompetisi yang sehat. Konsumen dan publik juga perlu lebih aktif memantau perkembangan ini, dengan melaporkan dugaan pelanggaran persaingan usaha serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem telekomunikasi yang adil, efisien, dan inklusif.

REFERENSI

- [1] Widodo, E. R., & Purnawinarni, E. (2021). *Tunas Pancasila*. Jakarta: Kemendikbud
- [2] Hermino, A. (2018). *Guru dalam Tantangan Globalisasi*. Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA.
- [3] Savitri, A. S., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan di Era Globalisasi. *INVENTA: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2), 165-176.
- [4] Hidayat, N. A. S. N., & Dewi, D. A. (2021). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Terhadap Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi. *EduPsyCouns: Journal of Education, Psychology and Counseling*, 3(1), 50-57.
- [5] Faujan, I. F. N., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Secara Komprehensif Menghadapi Tantangan Zaman Teknologi. *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 1(12).
- [6] Damanhuri, D., Bahrudin, F. A., Legiani, W. H., & Rahman, I. N. (2016). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa. *Untirta Civic Education Journal*, 1(2), 185–198. <https://doi.org/10.30870/ucej.v1i2.1890>
- [7] YALIDA, A. (2019). Pendidikan Karakter Yang Berbasis Pada Nilai-Nilai Pancasila di Kelas Iv Sdn No. 88 Kota Tengah Kota Gorontalo. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 88, 23–32. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/ilmi/article/view/262>
- [8] Eva Imania Eliasa. (2008). Peran Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan Karakter Siswa. Universitas Negeri Yogyakarta, 1–12.
- [9] Lasiyo, Soeprapto, S., & Wikandaru, R. (2019). Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila. Universitas Terbuka, 1–43.
- [10] Winarno. (2020). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Bumi Aksara.